

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM SAFETY RIDING DALAM MENINGKATKAN KESELAMATAN BERKENDARA DI SATUAN LALULINTAS POLRES MOJOKERTO KOTA

**Heru Sudjio Budi Santoso<sup>1)</sup>, Priyanto<sup>2)</sup>**

<sup>1)2)</sup> Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Email: Sudjiobudi@yahoo.com

### ABSTRACT

Perilaku disiplin berlalu lintas merupakan perilaku yang dipengaruhi oleh tingkat usia dengan bertambahnya usia seseorang yang diharapkan tingkah lakunya semakin terarah karena memiliki kecerdasan emosi yang baik dan tidak mudah bersikap emosional, sehingga dapat mematuhi peraturan yang berlaku dalam berkendara. Safety riding atau keselamatan berkendara merupakan suatu usaha yang bertujuan untuk meminimalisir tingkat bahaya sehingga memaksimalkan keselamatan dalam berkendara, menciptakan kondisi yang tidak akan membahayakan pengendara lain, dan memahami akan pencegahan serta penanggulangannya. Safety riding merupakan panduan untuk perilaku berkendara dalam rangka meminimalisasi risiko serta memaksimalkan keamanan ketika berkendara disetiap moda angkutan. Penulisan penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki sebuah fenomena sosial. Pada pendekatan ini, peneliti merupakan instrumen kunci dan peneliti harus mempunyai teori dan wawasan yang sangat luas agar mampu menggali informasi, bertanya, dan menganalisa obyek yang akan diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah yang akan diteliti masih belum jelas, dan juga untuk mengembangkan teori, serta memastikan kebenaran data. Dalam mensukseskan program safety riding, Unit Satuan Lalu Lintas Polres Mojokerto kota melakukan sosialisasi kepada berbagai elemen masyarakat, baik masyarakat umum, komunitas motor dan komunitas lainnya serta pelajar tentang bagaimana cara berkendara yang baik, benar, dan aman dengan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi safety riding. Kemudian ada Pelatihan safety riding ini dilaksanakan dengan mengajak masyarakat umum untuk semakin belajar bagaimana cara berkendara yang baik dan aman. Masyarakat Mojokerto Kota maupun sekitarnya memiliki akses pelatihan safety riding tanpa dipungut biaya apapun. Pelatihan safety riding ini sedikit banyak memberikan banyak manfaat Pelatihan Safety Riding.

**Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pelatihan Safety Riding**

### ABSTRACT

*Traffic discipline behavior is behavior that is influenced by the age level with increasing age of a person whose behavior is expected to be more directed because they have good emotional intelligence and are not easily emotional, so they can comply with applicable regulations in driving. Safety riding or driving safety is an effort which aims to minimize the level of danger so as to maximize driving safety, create conditions that will not endanger other motorists, and understand prevention and handling. Safety riding is a guide for driving behavior in order to minimize risk and maximize safety when driving in every mode of transportation. Writing this research using a type of qualitative descriptive research. A qualitative approach is a research process based on a methodology that investigates a social phenomenon. In this approach, the researcher is the key instrument and the researcher must have a very broad theory and insight in order to be able to dig up information, ask questions, and analyze the object to be studied more clearly. Qualitative research is used if the problem to be studied is still unclear, and also to develop theory, and to ensure the correctness of the data. In the success of the safety riding program, the Mojokerto City Police Traffic Unit conducts socialization to various elements of society, both the general public, motorcycle communities and other communities as well as students about how to drive properly, correctly and safely by organizing safety riding socialization activities. Then there is the safety riding training which is carried out by inviting the general public to learn more about how to drive properly and safely. The people of Mojokerto Kota and its surroundings have access to safety riding training free of charge. This safety riding training more or less provides many benefits of Safety Riding Training.*

**Keywords: Policy Implementation, Safety Riding Exercise**

## A. LATAR BELAKANG

Transportasi kendaraan roda dua banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Salah satunya digunakan oleh remaja awal dan tengah (Hidayat & Lakoro, 2012). Remaja merupakan salah satu segmen terbesar penyumbang kecelakaan lalu lintas (Chrussiawanti, 2015). Masa peralihan membuat remaja berpikir bahwa dirinya cukup dewasa untuk mengendarai kendaraan di jalan, tetapi masih banyak pelanggaran yang dilakukannya, sehingga sering menyebabkan terjadinya kecelakaan. Menurut Sarkar, Sheila dan Marie (dalam Khotimah, 2014) mengemukakan bahwa remaja memiliki resiko dalam mengemudi sangat besar. Maka dari itu peneliti memilih remaja yaitu pelajar SMP dan SMA sebagai target dari penelitian ini. Menurut data Mabes Polri di tahun 2018, angka kecelakaan lalu lintas tercatat sebanyak 103.672 kasus. Di Jawa Timur jumlah kecelakaan yang terjadi sebanyak 11 ribu kecelakaan (Dadang, 2019). Sedangkan di Surabaya khususnya, angka kecelakaan mencapai 1.191, dengan rincian korban meninggal dunia 181, luka berat 176 dan luka ringan 1.259. Perilaku safety riding diharapkan dilakukan oleh pengendara terutama pengendara kendaraan roda dua. Hal ini sangat diperlukan mengingat sepeda motor merupakan kendaraan mayoritas yang digunakan oleh masyarakat di Indonesia (Krisna dan Septian, 2019).

Penerapan Safety Riding ini telah diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada BAB XI Pasal 203 Ayat 2 huruf a yang berbunyi : "Untuk menjamin Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan rencana umum nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, meliputi: Penyusunan program nasional kegiatan Keselamatan dan Angkutan Jalan". Adapun penjelasan dari pasal 203 Ayat 2 huruf a yaitu bahwa program nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diantaranya yaitu tentang Cara Berkendara dengan Selamat (Safety Riding).

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka diperlukan solusi yang lebih baik lagi dalam menanggulangi tingginya kasus kecelakaan yang terjadi khususnya pada kendaraan roda empat. Dari data kecelakaan dan hasil penelitian yang terkait bahwa komponen yang paling mempengaruhi

ialah faktor manusia. Paparan di atas menjadikan peneliti merasa tertarik untuk membahas masalah tersebut, khususnya yang berkenaan dengan *self safety riding* pada pengemudi. Perilaku disiplin berlalu lintas penting bagi kehidupan seseorang karena seseorang akan mematuhi apa yang tidak boleh pada saat berlalu lintas di jalan raya. Baik dalam rambu ataupun tidak, sehingga seseorang akan mematuhi undang-undang ataupun peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pengemudi akan memiliki kesadaran dengan melakukan prosedur berkendara yang baik, benar dan aman. Kesadaran tersebut membuat pengendara akan memperhatikan rambu-rambu lalu lintas dalam berkendara sehingga akan menekan angka kecelakaan yang membahayakan dirinya sendiri maupun pengendara lainnya (Sutawi, 2006).

Faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin berlalu lintas yaitu pertama faktor eksternal, merupakan faktor yang berasal dari luar diri individu yang meliputi sarana prasarana lalu lintas, peran orang tua, peran teman dan peran polisi lalu lintas. Kedua faktor internal, merupakan faktor yang berasal dari diri individu berupa pengetahuan yang dimiliki remaja tentang peraturan lalu lintas dan kesadaran akan dampak pelanggaran lalu lintas. Salah satu wilayah di Jawa Timur yang juga memiliki kasus kecelakaan lalu lintas lumayan tinggi adalah Kota Mojokerto. Berdasarkan data yang tercatat dalam laporan Satuan Lalu Lintas Polres Mojokerto Kota, pada tahun 2022 telah terjadi kurang lebih 407 kejadian kecelakaan dengan rincian 85 korban meninggal dunia, 20 korban luka berat dan 518 korban luka ringan. Kejadian di tahun 2022 telah menelan kerugian material sebesar 709.300.000 rupiah. Sedangkan sepanjang tahun 2023 sampai dengan penelitian ini dilakukan, telah terjadi 208 kejadian kecelakaan dengan rincian 26 korban meninggal dunia, dan 275 korban luka ringan. Sejauh ini, kejadian di sepanjang tahun 2023 telah menelan kerugian material sebesar 197.100.000 rupiah. (Data Polres Mojokerto Kota).

Dengan adanya kejadian kecelakaan tersebut, dari hasil dugaan penelitian yang dilakukan masih banyaknya masyarakat dan pengguna jalan yang belum mendapatkan edukasi mengenai keselamatan berkendara sehingga kecelakaan lalu lintas masih sering terjadi. Maka dari itu Polres Mojokerto Kota melalui unit Satuan Lalu Lintas

(Satlantas) membuat program yang diberi nama program Safety Riding. Tujuan yang diharapkan oleh Polres Mojokerto Kota dalam menjalankan program *Safety Riding* bagi masyarakat Kota Mojokerto adalah untuk memberikan edukasi tentang keselamatan berkendara, memberikan arahan dan pelatihan tentang bagaimana berkendara di jalan umum dengan aman dan selamat. Selain itu, program ini juga sebagai bahan latihan dasar bagi masyarakat yang ingin melakukan ujian pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) agar nanti ketika melakukan ujian, masyarakat telah memahami bagaimana prosesnya. Program *safety riding* di Polres Mojokerto Kota ini telah berjalan selama hampir dua tahun dan masih akan terus berkembang. Harapannya ini akan terus dilakukan dengan melibatkan beberapa elemen seperti komunitas motor dan masyarakat umum.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pelaksanaan kebijakan program safety riding yang dilakukan oleh satuan lalu lintas Polres Mojokerto Kota dan judul penelitian yang akan digunakan adalah “Implementasi Kebijakan Program Safety Riding Dalam Meningkatkan Keselamatan Berkendara Di Satuan Lalu Lintas Polres Mojokerto Kota”.

## B. LANDASAN TEORITIS

### 1. Konsep Kebijakan Publik

Salah satu definisi mengenai Kebijakan Publik diberikan oleh Robert Eyestone (1971;18), Eyestone mengatakan bahwa secara luas kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai “hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya”. Konsep ini mengandung pengertian yang sangat luas dan kurang pasti karena apa yang dimaksud kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. Batasan lain tentang kebijakan publik diberikan oleh Thomas R. Dye (1975;1), yang mengatakan bahwa “Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (public policy is whatever government choose to do or not to do). Walaupun batasan yang diberikan ini agak tepat, namun batasan ini tidak cukup perbedaan yang jelas antara apa yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan dan apa yang sebenarnya dilakukan pemerintah.

Ada empat elemen utama dalam kebijakan publik yaitu :

- a. Input, adalah hal-hal yang mempengaruhi kebijakan publik seperti manusia (aktor), pengetahuan dan teknologi, informasi serta nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.
- b. Tujuan (goals), merupakan arah dari suatu kebijakan yang ingin dicapai oleh pembuat kebijakan.
- c. Perangkat (instruments), alat-alat yang digunakan dalam menjalankan suatu kebijakan.
- d. Dampak, hasil yang diperoleh dari suatu kebijakan baik yang diinginkan maupun yang tidak.

### 2. Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Definisi yang umum dipakai menyangkut kebijakan implementasi adalah: (Wahab, 1997: 63) “Implementasi adalah tindakantindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.” Dunn (1981: 56) menyatakan bahwa akan halnya implementasi kebijakan, lebih bersifat kegiatan praktis, termasuk di dalamnya mengeksekusi dan mengarahkan.

Sehubungan dengan sifat praktis yang ada dalam proses implementasi kebijakan di atas, maka hal yang wajar bahwa implementasi ini berkaitan dengan proses politik dan administrasi. Hal tersebut disebabkan karena ia menyangkut tujuan dari diadakannya kebijakan tersebut (policy goals). Dan jika dilihat dari konteks implementasi kebijakan, maka hal tersebut berkaitan dengan kekuasaan (power), kepentingan dan strategi para pelaku kebijakan, disamping karakteristik lembaga dan rezim serta ijin pelaksanaan dan respon terhadap kebijakan. Konteks implementasi demikian baru akan terlihat pengaruhnya setelah kebijakan tersebut dilaksanakan.

Selain itu, sebagaimana didalam kebijakan formulasi, didalam kebijakan implementasi juga terdapat 2 (dua) variabel yang sangat mempengaruhi terselenggaranya suatu implementasi, yaitu variabel Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Modal.

### 3. Model Implementasi Kebijakan

#### Model Implementasi Kebijakan Van Horn & Van Metter

Model pertama adalah model yang paling klasik, yakni model yang diperkenalkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975). Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementator, dan kinerja kebijakan publik.



Gambar 1. Model Kebijakan Donald VanMeter dan Carl Van Horn (1975).

Sumber: Donald VanMeter dan Carl Van Horn (1975).

Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah variabel berikut:

- Aktivitas Implementasi Dan Komunikasi Antar Organisasi.

Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana (implementors). Arah disposisi para pelaksana terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang krusial. Implementor mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan (Van Mater dan Van Horn, 1974).

- Karakteristik Agen Pelaksana/ Implementor.

Implementasi kebijakan diawali penyaringan (*befiltered*) lebih dahulu melalui persepsi dari pelaksana (*implementors*) dalam batas mana kebijakan itu dilaksanakan.

- Kondisi Ekonomi, Sosial, Dan Politik.

Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan

kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

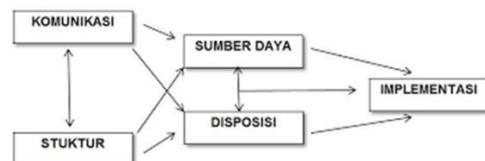
- Struktur Birokrasi

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya.

#### Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle

Model Implementasi Kebijakan Publik yang dikemukakan Grindle (1980:7) menuturkan bahwa Keberhasilan proses implementasi kebijakan sampai kepada tercapainya hasil tergantung kepada kegiatan program yang telah dirancang dan pembiayaan cukup, selain dipengaruhi oleh *Content of Policy* (isi kebijakan) dan *Contex of Implementation* (konteks implementasinya).

#### Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III



Gambar 2. Model Kebijakan Edward III  
Sumber: Edwards III

Edward menyarankan untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif:

- Komunikasi

Berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan/atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan. Edward menyebutkan terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur faktor komunikasi. Indikator tersebut antara lain: Transmisi, Kejelasan Komunikasi, Konsistensi Perintah.

- Resources

Berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan

kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk carry out kebijakan secara efektif.

c. Disposition.

Suatu disposisi dalam implementasi yaitu karakteristik, sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdas dan sifat demokratis. Implementor baik harus memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan dan ditetapkan oleh pembuat kebijakan.

d. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi *bureaucratic fragmentation* karena struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif.

#### 4. Kecelakaan Lalu Lintas

Definisi Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengungkapkan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 229, karakteristik kecelakaan lalu lintas dapat dibagi kedalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

- a) Kecelakaan Lalu Lintas Ringan, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- b) Kecelakaan Lalu Lintas Sedang, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- c) Kecelakaan Lalu Lintas Berat, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

#### 5. Konsep Keselamatan Berkendara (*Safety Riding*)

Safety riding adalah perilaku mengemudi yang aman yang bisa membantu untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Safety riding merupakan dasar pelatihan

berkendara lebih lanjut yang lebih memperhatikan keselamatan bagi pengemudi dan penumpang. Safety riding didesain untuk meningkatkan awareness (kesadaran) pengendara terhadap segala kemungkinan yang terjadi selama berkendara (Ariwibowo, 2013:4).

Konsep safety riding kemudian dikembangkan menjadi defensive driving, merupakan pengembangan lebih lanjut dari safety riding yang sudah ada dimana terdapat 3 (empat) kunci utama prinsip defensive driving tersebut, yaitu:

- a) Kewaspadaan (Alertness), merupakan faktor utama yang menjamin pengendara untuk selalu siaga dan waspada.
- b) Kesadaran (Awareness), adalah penguasaan diri dalam berkendara.
- c) Sikap dan mental (Attitude), merupakan faktor dominan yang sangat menentukan keselamatan di jalan raya.

#### 6. Program Safety Riding Satlantas Polres Mojokerto Kota

Program Safety Riding dijalankan oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Mojokerto Kota merupakan program yang sudah berjalan menuju dua tahun. Program ini dijalankan atas dasar masih tingginya angka ketidaksadaran masyarakat akan bahaya yang ada di jalan.

Adapun landasan hukum yang mendasari berjalannya program safety riding di Polres Mojokerto Kota adalah sebagai berikut :

- a) Undang-Undang No: 2 Th.2002 Ttg Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.
- c) Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol.
- d) Undang-Undang No: 22 Th. 2009 Ttg Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- e) Rencana Kerja Ditlantas Polda Jatim T.A 2019.
- f) Surat Nomor: B/173//Iii/2019 Ttg Permohonan Sosialisasi Safety Riding Tgl 20 Maret 2019.

### C. METODE

#### 1. Jenis Penelitian

Penulisan penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian yang

berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki sebuah fenomena sosial. Pada pendekatan ini, peneliti merupakan instrumen kunci dan peneliti harus mempunyai teori dan wawasan yang sangat luas agar mampu menggali informasi, bertanya, dan menganalisa obyek yang akan diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah yang akan diteliti masih belum jelas, dan juga untuk mengembangkan teori, serta memastikan kebenaran data.

## 2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pemusatan fokus kepada intisari penelitian yang akan dilakukan. Hal tersebut harus dilakukan dengan cara eksplisit agar kedepannya dapat meringankan peneliti sebelum turun atau melakukan observasi/pengamatan.

Pada penelitian ini yang menjadi focus penelitian adalah Bagaimana implementasi program safety riding yang dilakukan oleh jajaran satuan lalu lintas Polres Mojokerto Kota. Kemudian focus penelitian yang kedua adalah Faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan program safety riding di Polres Mojokerto Kota. Kedua focus ini akan diteliti menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III yang memuat beberapa variable diantaranya :

- a. Komunikasi
- b. Sumber Daya
- c. Struktur Birokrasi
- d. Disposisi

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan sebuah tempat yang digunakan untuk proses pengambilan data yang dibutuhkan untuk menganalisa permasalahan yang terjadi. Dalam penelitian ini lokasi yang dijadikan tempat pengambilan data dan informasi terkait program safety riding yang ada di Kota Mojokerto yaitu bertempat di Polres Mojokerto Kota.

## 4. Informan Penelitian

Penelitian ini melibatkan beberapa orang yang akan dijadikan sebagai informan penelitian yang akan memberikan informasi mengenai aspek permasalahan dalam penelitian. Beberapa informan yang akan memberikan informasi untuk penelitian ini

adalah Pimpinan Polres Mojokerto, Unit Satuan Lalu Lintas (Satlantas), Personel pelaksana program, dan masyarakat yang terlibat.

## 5. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan data-data penelitian adalah studi kepustakaan dan studi lapangan.

- a. Studi Kepustakaan, yaitu proses pengumpulan data mengenai teori-teori yang digunakan sebagai bahan dalam menganalisa apa saja permasalahan dengan menggunakan temuan dari para ahli.
- b. Studi Lapangan, yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan berada langsung pada lokasi yang meliputi proses wawancara, dokumentasi, dan observasi.

## 6. Prosedur Analisis Data

Mengutip salah seorang pakar metode penelitian, Lexy J. Moleong, teknik analisis data adalah kegiatan analisis pada suatu penelitian yang dikerjakan dengan memeriksa seluruh data dari instrumen penelitian, seperti catatan, dokumen, hasil tes, rekaman, dan lain-lain. Kegiatan ini dilakukan agar data lebih mudah dipahami, sehingga diperoleh suatu kesimpulan.

Adapun prosedur yang ditulis pada penelitian ini adalah prosedur penelitian *grounded theory* yang diadaptasi dari Strauss & Corbin (Creswell, 2007: 66- 67). Prosedur yang dimaksud adalah sebagai berikut.

- a) Memastikan bahwa permasalahan yang akan diteliti cocok jika dikaji/ diteliti/ diselesaikan dengan menggunakan *grounded theory*.
- b) Menentukan partisipan dan menyusun pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian haruslah difokuskan pada pertanyaan untuk memperoleh pemahaman terhadap bagaimana partisipan mengalami dan menjalani suatu proses tertentu.
- c) Mengumpulkan data penelitian melalui kegiatan wawancara.
- d) Melakukan analisis data. Bahwa ada tiga tahap analisis data, yaitu: *open coding axial coding*; dan *selective coding*.
- e) Setelah melakukan analisis data, peneliti mengembangkan dan memotret secara visual suatu perangkat (disebut: conditional

matrix) yang berguna dalam membantu peneliti untuk menghubungkan antara kondisi mikro dan makro yang memengaruhi fenomena.

#### D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

##### Gambaran Umum Kota Mojokerto

Kota Mojokerto merupakan salah satu wilayah yang masuk dalam provinsi Jawa Timur. Kota Mojokerto menjadi salah satu dari 38 Kabupaten/Kota yang ada ujung timur pulau Jawa dan masuk dalam kategori wilayah terkecil dengan jumlah penduduk sebesar 140.730 jiwa yang terbagi pada tiga kecamatan yaitu Kecamatan Kranggan, Magersari, dan Prajurit Kulon.



Gambar 3. Peta Administrasi Kota Mojokerto  
Sumber: Penelusuran Google

##### Gambaran Umum Satuan Lalu Lintas Polres Mojokerto Kota

Polisi lalu lintas merupakan unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

*Safety Riding* adalah perilaku mengemudi secara selamat yang bisa membantu untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Berkaitan mengenai tatacara berkendara yang aman, perlengkapan yang harus ada saat berkendara dan kondisi kendaraan yang memungkinkan untuk digunakan. *Safety Riding* dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pengendara terhadap segala kemungkinan yang terjadi selama berkendara. Inti dari *Safety Riding* itu sendiri adalah mengutamakan keselamatan, yaitu keselamatan diri dan juga pengguna jalan lain. Manopo, dkk, (2018) mengungkapkan *Safety*

*Riding* berarti berkendara sepeda motor dengan aman, sesuai aturan. Pokok utama dari *Safety Riding* adalah mengutamakan keselamatan, yaitu keselamatan diri dan juga pengguna jalan yang lain.

Dengan adanya undang-undang yang didalamnya terdapat aturan *Safety Riding* dan berkendara aman serta selamat mungkin akan bisa lebih membangun kesadaran akan keselamatan berkendara lebih baik lagi.

##### a) SIM Atau Surat Izin Mengemudi

Di undang – undang menyebutkan bahwa hal pertama yang harus dimiliki adalah Surat Izin Mengemudi. Menurut UU No 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, SIM adalah sebuah persyaratan yang harus dimiliki oleh pengendara yang menggunakan jalan raya.

##### b) Pejalan Kaki Harus Didahulukan

Dimanapun itu pejalan kaki harus mendapatkan prioritas utama dibandingkan dengan kendaraan bermotor.

##### c) Peraturan Lalu Lintas

Sebagai pengendara sepeda motor maka wajib untuk memenuhi segala peraturan lalu lintas. Seperti tercantum di UU yang sama yaitu UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa setiap pengguna kendaraan bermotor wajib mengetahui peraturan lalu lintas.

##### d) Standar Keselamatan Berkendara

Pertama pengguna jalan wajib untuk menggunakan helm. Penggunaan helm SNI atau standar nasional diharuskan untuk melindungi seseorang dari cedera yang tidak diinginkan.

##### e) Sepeda Motor Memenuhi Persyaratan Teknis

Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Susunan
- 2) Perlengkapan
- 3) Ukuran
- 4) Karoseri
- 5) Rancangan teknis sesuai diperuntukkannya

##### Implementasi Program Safety Riding Polres Mojokerto Kota

Program *Safety Riding* yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Mojokerto Kota merupakan program yang sudah berjalan sejak awal tahun dengan memaksimalkan beberapa unsur yang ada. Program *Safety Riding* yang dijalankan tersebut dilakukan mengingat masih tingginya angka kecelakaan dan kurangnya

kesadaran masyarakat akan keselamatan berkendara sehingga menyebabkan kecelakaan.

Tabel 1. Jumlah Data Kecelakaan Di Wilayah Mojokerto Kota Periode Tahun 2022-2023

No	Tahun	Jumlah Kejadian	Kondisi			Kermat
			MD	LB	LR	
1.	2022	407	85	20	518	Rp.790.300.000,-
2.	2023	208	26	0	275	Rp.197.100.000
<b>Jumlah</b>		615	111	20	793	Rp.987.400.000

Sumber: Data Polres Mojokerto Kota)

Adapun beberapa penyebab kecelakaan yang berhasil dicatat oleh Satlantas Polres Mojokerto Kota sebagai berikut :

- 1) Menggunakan Gadget ketika berkendara
- 2) Tidak Menggunakan Helm Standar SNI
- 3) Melebihi Batas Kecepatan
- 4) Mabuk Saat Berkendara
- 5) Tidak Menggunakan Safety Belt
- 6) Muatan Yang Melebihi Kapasitas

Dengan adanya beberapa kejadian dan factor penyebab kecelakaan yang telah dijelaskan di atas, maka Unit Satlantas Polres Mojokerto Kota semakin berupaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang terjadi dengan menjalankan program Safety Riding di Polres Mojokerto Kota. Ada beberapa langkah yang dijalankan guna menjalankan program Safety Riding tersebut yaitu :

- 1) Sosialisasi Program Safety Riding Kepada Elemen Masyarakat

Dalam mensukseskan program Safety Riding, Unit Satuan Lalu Lintas Polres Mojokerto kota melakukan sosialisasi kepada berbagai elemen masyarakat, baik masyarakat umum, komunitas motor dan komunitas lainnya serta pelajar tentang bagaimana cara berkendara yang baik, benar, dan aman dengan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi *Safety Riding*. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan berbagai cara seperti mendatangi masyarakat secara langsung hingga mengadakan kegiatan di lokasi Polres Mojokerto dengan mengundang elemen masyarakat lainnya.

Salah satu yang paling efektif adalah dengan melibatkan elemen komunitas motor yang ada di Kota Mojokerto. Polres Mojokerto menggandeng Komunitas Motor *Bold Riders*

dan kegiatan ini diikuti oleh puluhan anggota *Bold Riders* Mojokerto. Kegiatan sosialisasi *Safety Riding* tersebut dilaksanakan di Satuan Penyelenggara Administrasi Satlantas Polres Mojokerto Kota.

- 2) Pelatihan Safety Riding Untuk Masyarakat Secara Rutin

Pelatihan Safety Riding ini dilaksakan dengan mengajak masyarakat umum untuk semakin belajar bagaimana cara berkendara yang baik dan aman. Masyarakat Mojokerto Kota maupun sekitarnya memiliki akses pelatihan Safety Riding tanpa dipungut biaya apapun. Pelatihan Safety Riding ini sedikit banyak memberikan banyak manfaat Pelatihan Safety Riding. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Skill Berkendara
- b. Mulai Sadar Dan Menerapkan Safety Riding Secara Nyata
- c. Mengetahui Komunitas Safety Riding
- d. Mengetahui Kesalahan Dalam Berkendara Selama Ini

### Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Safety Riding

Dalam pelaksanaan program Safety Riding yang dilaksanakan oleh Polres Mojokerto Kota, ada beberapa hal yang berhasil dicatat oleh peneliti terkait factor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan program maupun yang menghambat pelaksanaan program tersebut yaitu diantaranya :

#### 1. Faktor Pendukung

- a. Angka Kecelakaan Yang Harus Diturunkan  
Peneliti melihat bahwa salah satu yang mendukung adanya program ini adalah untuk mengurangi angka kecelakaan yang ada di Kota Mojokerto. Jadi peneliti melihat bahwa keberadaan program Safety Riding ini sebagai upaya preventif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dengan mengedukasi masyarakat tentang tata cara berkendara yang baik dan aman.

- b. Antusiasme Masyarakat

Peneliti melihat bahwa keberadaan Safety Riding ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Mojokerto Putra dan sekitarnya. masyarakat begitu tertarik untuk belajar bagaimana cara berkendara yang baik dan benar serta berkendara dengan aman. Selain itu, alasan lain mengapa banyak masyarakat yang antusias adalah karena banyak yang ingin belajar agar bisa

ikut serta lolos dalam uji SIM jika akan melakukan tes

## 2. Faktor Penghambat

### a. Cuaca Buruk (Hujan)

Salah satu yang menghambat dalam pelaksanaan program ini adalah perubahan cuaca yang berubah menjadi hujan sehingga program ini urung terlaksana.

## Analisa Menggunakan Variabel George Edward III

Pada penelitian ini peneliti kan membahas bagaimana implementasi program Safety Riding yang diselenggarakan oleh Polres Mojokerto Kota menggunakan variable yang ada pada model implementasi George Edward III seperti factor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi :

### 1) Komunikasi

Pelaksanaan program Safety Riding memang menjadi salah satu program utama yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Mojokerto Kota. Untuk mencapai keberhasilan kegiatan program ini tentu Unit Satlantas tidak akan berjalan sendiri. Salah satu bentuk kordinasi yang dilakukan adalah dengan menjalin komunikasi dengan beberapa pihak seperti yang dilakukan pada komunitas motor maupun mobil dan juga masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan baik dari aspek internal maupun eksternal berjalan cukup baik. Bentuk komunikasi yang dilakukan yaitu dengan menjalin koordinasi dengan verbal dan dilanjutkan secara administrative dengan mengirimkan surat undangan kepada pihak terkait.

### 2) Sumber Daya

Factor sumber daya yang mendukung kegiatan program pelatihan Safety Riding ini dirasa penulis sangat mencukupi mulai dari sumber daya manusia yang menurunkan dua petugas untuk memberikan edukasi kepada peserta pelatihan. Selain itu Satlantas juga bekerja sama dengan binmas. Fungsi bhabinkamtibmas , untuk mensosialisasikan kepada semua masyarakat termasuk di desa-desa bahwa Satlantas Polres Mojokerto Kota melakukan kegiatan safety raiding secara gratis yang pelaksanaannya di kantor satpas. Kemudian terkait sumber daya fasilitas juga mendukung seperti tersedianya sarana dan prasarana yang dijadikan sebagai tempat

pelaksanaan program dan juga kendaraan latihan yang sudah disediakan oleh Unit Satlantas.

Proses implementasi kebijakan juga tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya finansial dengan baik, saat berjalanya program tersebut harus ada integritas dalam melayani terhadap publik, dalam penggunaan dana haruslah sesuai kebutuhan yang ada dan juga transparansi.

### 3) Disposisi

Dapat diketahui bahwa secara normatif program kegiatan pelatihan Safety Riding ini dapat terlaksana dengan baik tergantung dari sikap para pelaksana program masing-masing bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada, bagaimana untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi pengangguran di daerahnya masing-masing. Peneliti melihat bahwa kesiapan dan keterampilan petugas dalam memberikan edukasi dan melakukan pendampingan selama proses pelatihan Safety Riding cukup baik.

### 4) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang ada di Polres Mojokerto Kota khususnya unit yang bertugas menjalankan program Safety Riding yaitu Satlantas ini telah memiliki birokrasi yang cukup baik, dengan menjalankan segala kebijakan yang telah disusun dan mampu melaksanakan program dengan baik cepat dan tepat sasaran. System birokrasi kepolisian selalu dituntut untuk cepat, tepat, transparan dan akuntabel.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN

### 1. Kesimpulan

Safety Riding adalah perilaku mengemudi secara selamat yang bisa membantu untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Inti dari safety riding itu sendiri adalah mengutamakan keselamatan, yaitu keselamatan diri dan juga pengguna jalan lain. Ada beberapa langkah yang dijalankan guna menjalankan program safety riding tersebut yaitu:

#### a) Sosialisasi Program Safety Riding Kepada Elemen Masyarakat.

Dalam mensukseskan program safety riding, Unit Satuan Lalu Lintas Polres Mojokerto kota melakukan sosialisasi kepada berbagai elemen masyarakat, baik masyarakat umum, komunitas motor dan

komunitas lainnya serta pelajar tentang bagaimana cara berkendara yang baik, benar, dan aman dengan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi safety riding. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan berbagai cara seperti mendatangi masyarakat secara langsung hingga mengadakan kegiatan di lokasi Polres Mojokerto dengan mengundang elemenmasyarakat lainnya.

b) Pelatihan Safety Riding Untuk Masyarakat Secara Rutin

Pelatihan safety riding ini dilaksanakan dengan mengajak masyarakat umum untuk semakin belajar bagaimana cara berkendara yang baik dan aman. Masyarakat Mojokerto Kota maupun sekitarnya memiliki akses pelatihan safety riding tanpa dipungut biaya apapun.

Kemudian kesimpulan lainnya yaitu ada beberapa hal yang berhasil dicatat oleh peneliti terkait factor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan program maupun yang menghambat pelaksanaan program tersebut yaitu diantaranya :

- 1) Faktor Pendukung
  - a. Angka Kecelakaan Yang Harus Diturunkan
  - b. Antusiasme Masyarakat
- 2) Faktor Penghambat
  - a. Cuaca Buruk (Hujan)

Pada penelitian ini peneliti kan membahas bagaimana implementasi program Safety Riding yang diselenggarakan oleh Polres Mojokerto Kota menggunakan variable yang ada pada model implementasi George Edward III seperti factor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi :

- 1) Komunikasi  
Dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan baik dari aspek internal maupuneksternal berjalan cukup baik

- 2) Sumber Daya  
Factor sumberdaya yang mendukung kegiatan program pelatihan safety riding ini dirasa penulis sangat mencukupi mulai dari sumber daya manusia yang menurunkan dua petugas untuk memberikan edukasi kepada peserta pelatihan. Selain itu Satlantas juga bekerja sama dengan binmas

3) Disposisi

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa secara normatif program kegiatan pelatihan safety riding ini dapat terlaksana dengan baik tergantung dari sikap para pelaksana program masing-masing bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada, bagaimana untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi pengangguran di daerahnya masing-masing.

4) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang ada di Polres Mojokerto Kota khususnya unit yang bertugas menjalankan program Safety Riding yaitu Satlantas ini telah memiliki birokrasi yang cukup baik, dengan menjalankan segala kebijakan yang telah disusun dan mampu melaksanakan program dengan baikcepat dan tepat sasaran.

## 2. Rekomendasi

Untuk semakin memberikan peningkatan dalam pelaksanaan program safet riding oleh Polres Mojokerto Kota, Peneliti bermaksud memberikan saran dan masukan yaitu sebagai berikut :

- 1) Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya warga masyarakat yang ingin berkendara yang benar dan aman serta peraturan lalu lintas , sehingga pengendara paham betul tata cara berlalu lintas yang benar , utamnlanya saat ini, proses pencarian ujian sim sangat disorot dan dirasa menyulitkan masyarakat, oleh sebab itu kita beri pelatihan berkendara yang betul dan aman melalui safety raiding ini.
- 2) Kemudian peneliti berharap agar masyarakat semakin antusias untuk mengikuti pelatihan safety riding ini agar semakin memiliki wawasan dan pengetahuan dalam berkendara. Hal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat sebagai pengguna jalan agar terhindar dari kecelakaan.

## REFERENSI

- Anggara, S. (2018). Pengantar Kebijakan Publik. CV Pustaka Setia.
- Dunn, W. N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. UGM Press.
- Miles, M. ., & Huberman, A. . (1992). Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru (P. T. Rohidi (ed.)). Universitas Indonesia.
- Mulyadi, D. (2016). Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik: Konsep Dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik. Alfabeta.
- Subarsono, A. (2013). ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK Konsep Teori dan Aplikasi. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta.
- Amanda, P. I. (2020). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). TheJournalish: Social and Government, 1(1), 34–38. <http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/view/>.
- Hafni, R., Sinulingga, N. S. B., & Hasibuan, L. S. (2021). Analisis Evaluasi Kebijakan Bantuan Langsung tunai dana desa pada ketahanan pangan di era pandemi (studi kasus Desa Simpang Empat, Kec. Simpang Empat, Kab. Asahan, Prov. Sumatera Utara). Proceeding Seminar Nasional Kewirausahaan, 2(1), 103–111.
- HANDAYANI, F. (2022). Implementasi Kebijakan Aplikasi Sipolima Pada Dinas Kominfo Kota Baubau Dalam Meningkatkan Kinerja Asn Ditengah Pandemi Covid-19. Doctoral Dissertation, INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI, 12, 12.
- Mahsyar, A. (2011). Masalah Pelayanan Publik di Indonesia Dalam Perspektif Administrasi Publik. Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1(2), 81–90. <https://doi.org/10.26618/ojip.v1i2.22>
- Mutia, I. F. (2017). Analis Kebijakan Publik (Issue April).
- Wahab, S. A. (2012). ANALISIS KEBIJAKAN Dari Formulasi ke Penyusunan Model- Model Implementasi Kebijakan Publik (F. Hutari (ed.)). Bumi Aksara.
- Konsep Kebijakan Publik, [https://repository.uinsuska.ac.id/12620/7/7.%20BAB%20II\\_2018115ADN.pdf](https://repository.uinsuska.ac.id/12620/7/7.%20BAB%20II_2018115ADN.pdf) diakses pada 11 Juli 2023
- <https://eprints.uny.ac.id/8530/3/BAB%202%20-%202007401241045.pdf> diakses pad 11 Juli 2023
- Sujarwoto, Dinamika Konsep Kebijakan Publik. <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/DAPU6106-M1.pdf> diakses pada 11 Juli 2023

